

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mukhotib MD (1998: xv-xvi) menyatakan bahwa media massa diyakini dapat melanggengkan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam marginalisasi, sub-ordinasi, beban ganda, *stereotype* dan kekerasan yang menyebabkan perempuan berada dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Ketidakadilan gender tersebut bahkan mampu menghapuskan hak-hak asasi perempuan sebagai manusia.

Media massa, baik dalam manajemen organisasi maupun pemberitaan, selama ini masih mengandung bias gender. Menurut Akhmad Zaini (Mukhotib: 1998: 79), bias gender dalam manajemen organisasi dapat terjadi melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh sebuah organisasi pers, misalnya kebijakan yang terkait dengan rekrutmen, promosi, mutasi, penempatan dan pendelegasian tugas. Bias gender dalam manajemen organisasi pers dapat menyebabkan perempuan mengalami perlakuan tidak adil, misalnya kehilangan kesempatan untuk menduduki posisi puncak maupun posisi strategis lain dalam organisasi pers tempat perempuan yang bersangkutan bekerja.

Selain dalam manajemen organisasi, bias gender juga terdapat dalam pemberitaan. Bias gender dalam pemberitaan salah satunya tampak pada artikel *Keperawatan Gadis Brazil Ini Akhirnya Dihargai Rp 7,5 Milyar* (Asido, 2012). Diskriminasi terhadap perempuan nyata dalam paragraf keenam pemberitaan:

Tindakan Catarina semakin menjadi kontroversi lantaran kisahnya itu akan dibuat film dokumenter oleh kru film asal Australia dengan judul *Virgins Wanted*. Catarina menyebut kesempatan ini sebagai bisnis dan membuat dirinya dapat berpergian gratis serta mendapat bonus (Asido, 2012).

Paragraf tersebut meneguhkan pandangan diskriminatif bahwa perempuan merupakan objek seksual/ simbol seks yang selalu melihat pada dirinya sendiri.

Pemberitaan menjadi tidak proporsional lantaran latar belakang Catarina melelang keperawanan hanya dibahas dalam satu dari delapan paragraf yang ada:

Mahasiswi jurusan psikologi ini berencana menyumbangkan uang hasil lelang itu ke sebuah lembaga nirlaba di Brasil untuk membangun rumah bagi warga miskin di Negara Bagian Santa Catarina. Sepertiga dari enam juta penduduk di wilayah Selatan Brasil itu tergolong miskin (Asido, 2012).

Media mengesampingkan hak seksual seorang perempuan. Hak-hak seksual menurut WHO (WHO, 2012) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang sesungguhnya telah tercantum dalam hukum nasional, dokumen internasional tentang HAM dan konsensus lainnya. Hak-hak seksual adalah hak semua orang, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan, antara lain untuk menentukan apakah menjadi aktif secara seksual atau tidak dan melakukan hubungan seks atas dasar kesepakatan.

Fenomena bias gender dalam media massa, baik melalui manajemen organisasi maupun pemberitaan, terjadi karena menurut Eriyanto (Setyawati, 2009: 11), wartawan dan lembaga jurnalistik merupakan lembaga sosial yang tidak berada dalam ruang yang hampa.

Eriyanto mengatakan bahwa lembaga jurnalistik berpotensi menciptakan berita yang bias gender karena terdapat konstruksi subjektif wartawan yang dipengaruhi oleh dinamika interaksi yang melibatkan wartawan sebagai individu, wartawan dengan lembaga jurnalistik tempatnya bekerja dan lembaga jurnalistik dengan lembaga sosial lain yang ada di masyarakat (Setyawati, 2009: 11).

Wartawan sebagai individu belum tentu memiliki pemahaman yang baik perihal isu gender. Ketika wartawan sebagai individu telah memiliki pemahaman yang baik, lembaga jurnalistik tempat ia bekerja belum tentu berpihak pada kesetaraan maupun keadilan berbasis gender. Banyak media yang mengeksploitasi tubuh perempuan dan menjadikannya komoditi untuk meningkatkan tiras, misalnya dalam pemberitaan kasus perkosaan yang berjudul *Rakusnya Bandot Tua* berikut ini.

Sosok Mince, sebagai perempuan korban perkosaan, dideskripsikan dalam berita tersebut, seperti *...sebut saja Mince (13), walau masih berusia pra remaja, termasuk jenis hibrida yang tumbuh bongsor dengan bentuk semlohei, wajahnya imut-imut tapi kelakuannya amit-amit*. Penyusunan kalimat dalam berita tersebut menempatkan perempuan dalam dua kekerasan sekaligus, yaitu kekerasan dari laki-laki yang memperkosanya dan “perkosaan” dari media yang memberitakan hal tersebut (Setyawati, 2009: 75-76).

Deskripsi berlebihan atas tubuh perempuan korban kekerasan seksual yang sebenarnya tidak relevan dengan pemberitaan berpotensi memunculkan imajinasi yang cenderung tidak empati, terhadap korban perkosaan, dalam benak pembaca. Wartawan, melalui pemilihan kata seperti di atas, seolah-olah ingin meyakinkan pembaca bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut layak menerima kekerasan seksual dari orang lain (Setyawati, 2009: 78).

Bias gender dalam media massa juga dapat terjadi karena adanya interaksi lembaga jurnalistik dengan lembaga sosial lain yang ada di masyarakat.

Berita sebagai produk dari lembaga jurnalistik merupakan hasil pertarungan antarkelompok, baik di media tersebut maupun di masyarakat. Kelompok dominan dengan ideologi dominan, seperti ideologi patriarki, heteronormativitas dan kapitalisme, akan memenangkan pertarungan atas kelompok yang tidak dominan, salah satunya perempuan dan masyarakat dengan orientasi seksual di luar heteroseksual (Setyawati, 2009: 12-13).

Hal di atas melatarbelakangi berdirinya Kantor Berita Swara Nusa. Kantor berita ini didirikan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 2009. Arsita Mega Okta, selaku Redaktur Pelaksana Swara Nusa, menyatakan bahwa Kantor Berita Swara Nusa melalui produknya, yaitu portal berita *online* berkonten khusus, menasar para pelaku media di Indonesia (Okta, wawancara, 16 Juli 2014).¹ Swara Nusa menjadi kantor berita pertama di Indonesia yang mengusung isu kesehatan seksual dan reproduksi, gender dan HAM sebagai isu utama (Antara, 2009). Swara Nusa berusaha mengubah *mindset* para pelaku media supaya lebih ramah ketika bicara mengenai, salah satunya gender (Okta, wawancara, 16 Juli 2014).

Lingga Tri Utama (wawancara, 4 April 2014), selaku mantan Editor Swara Nusa, menyatakan bahwa penulisan berita yang banyak disajikan media massa pada umumnya lebih didominasi oleh hasil kerja teknis jurnalistik dan cenderung mengabaikan nalar idealisme, serta komitmen kepada kebenaran dan keadilan. Pembebasan cara berpikir dan bertindak yang terbelenggu pada hubungan kekuasaan tidakimbang kerap menghasilkan produk jurnalistik yang menyudutkan sebagian kelompok dan membenarkan kelompok lain secara tidak adil (Swara Nusa, 2008: 1). Jika hal ini meningkat menjadi semacam budaya dalam jurnalisme, konsumen media dapat terjebak dalam informasi yang tidak mencerdaskan, bahkan melanggengkan ketidakadilan sosial, apalagi ketika bicara mengenai isu kesehatan seksual dan reproduksi, gender dan HAM (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014).

¹ Konten khusus (Antara, 2009) diartikan sebagai konten seputar isu kesehatan seksual dan reproduksi, gender dan HAM.

Swara Nusa dibuat dalam rangka mewujudkan praktik jurnalisme yang lebih ideal, salah satunya jurnalisme sensitif gender (Utama, wawancara, 4 April 2014). Jurnalisme sensitif gender akan menghasilkan pemberitaan-pemberitaan yang lebih manusiawi dan adil (Mukhotib, 1998: xvi). Jurnalisme sensitif gender akan mendorong terciptanya sebuah keadilan berbasis gender di tengah masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional sebuah media *online* berkonten khusus, Swara Nusa.²

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional Swara Nusa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional Swara Nusa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dibuat untuk memberikan sumbangan terhadap riset Ilmu Komunikasi, khususnya jurnalisme, yang berkaitan dengan isu gender.

² Penerapan adalah perihal mempraktikkan (KBBI, 2014).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional media *online* berkonten khusus.

E. Kerangka Teori

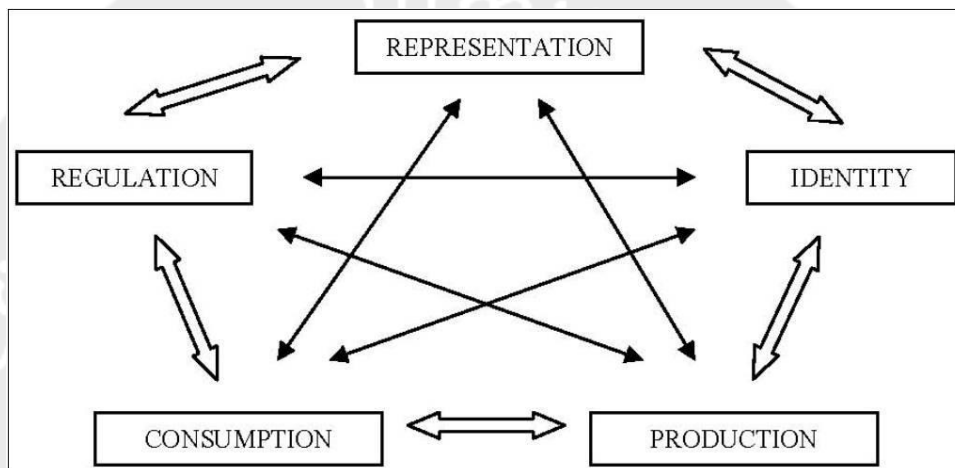
1. *Circuit of Culture: Media dan Gender*

Menurut Stuart Hall (1997: 15) dalam Teori Representasi, *circuit of culture* membantu kita untuk mengetahui dan melihat bagaimana proses sebuah makna diproduksi dan diartikulasikan dalam konteks budaya. Lima unsur penting dalam proses ini, yaitu representasi, identitas, regulasi, produksi dan konsumsi. Kelima unsur ini berhubungan timbal balik atau memiliki hubungan dua arah antara satu dengan yang lainnya. Representasi menjadi bagian penting dari proses dimana makna diproduksi dan dipertukarkan antara anggota dalam suatu budaya.

Representasi adalah produksi makna dari konsep yang ada di kepala kita melalui bahasa (Listiorini, 2009: 52). Makna hanya bisa dibagi melalui akses bahasa. Bahasa mampu mengonstruksi makna. Interaksi sosial yang berbeda membuat makna juga diproduksi dan dipertukarkan secara berbeda, misalnya mengenai orientasi seksual, pandangan masyarakat yang didominasi ideologi heteronormativitas dan masyarakat yang didominasi ideologi pluralisme tentu akan berbeda ketika berhadapan dengan lesbian atau gay. Masyarakat yang didominasi ideologi heteronormativitas cenderung menganggap praktik seksualitas di luar heteroseksual, seperti hubungan homoseksual, sebagai

penyimpangan, sedangkan masyarakat yang didominasi ideologi pluralisme cenderung menganggap hal tersebut sebagai keberagaman yang patut dihargai.

BAGAN 1
Circuit of Culture



Sumber: Hall (Listiorini, 2009: 50)

Bagan 1 menunjukkan bagaimana makna gender dikonstruksikan. Fakhri (1994: 8) menyatakan bahwa istilah gender mengarah pada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat tertentu. Perbedaan perilaku ini disosialisasikan secara sistemik dalam sebuah tataran masyarakat (Listiorini, 2009: 6). Media merupakan salah satu agen sosialisasi perbedaan perilaku tersebut.

Berita, sebagai produk lembaga jurnalistik, kerap melanggengkan diskriminasi berbasis gender. Laki-laki selalu diidentikkan dengan maskulinitas, sedangkan perempuan dengan femininitas. Hal tersebut harus dipahami sebagai hasil konstruksi subjektif wartawan. Menurut Eriyanto (2003: 19-36), konstruksi subjektif tersebut berada dalam dinamika interaksi yang melibatkan wartawan

sebagai individu, wartawan dengan lembaga jurnalistik tempatnya bekerja, dan lembaga jurnalistik dengan lembaga sosial lain yang ada di masyarakat. Berita tidak diproduksi dalam ruang yang hampa.

Pemahaman pekerja media yang kurang baik perihal isu gender ditambah relasi kuasa yang tidak seimbang dalam dunia jurnalistik berpotensi menciptakan produk yang sarat diskriminasi berbasis gender. Dalam lembaga jurnalistik, dapat terjadi bahwa berita bukanlah produk jurnalistik yang netral, melainkan hasil pertarungan antarkelompok, baik di media tersebut maupun di masyarakat (Setyawati, 2009: 12). Kelompok dominan dengan ideologi dominan, seperti ideologi patriarki, heteronormativitas dan kapitalisme, akan memenangkan pertarungan atas kelompok yang tidak dominan, salah satunya perempuan.

Media massa dalam perspektif kajian budaya menjadi salah satu tempat untuk memproduksi dan mereduksi makna. Dalam kajian budaya pop, Colin Sparks (Adlin, 2006: 94) mengelompokkan pers menjadi dua, yaitu pers populer dan pers berkualitas.

Menurut Fikse, pers populer beroperasi pada garis batas antara ruang publik dan ruang privat: gayanya sensasional, terkadang skeptis, tidak jarang bersungguh-sungguh secara moralistis, ungkapannya populis, kelonggaran bentuknya menampik perbedaan stilistik antara fiksi dan dokumenter, antara berita dan hiburan (Dahlgren dan Sparks, 1992: 48).

Hal ini berkaitan dengan ulasan berita di bagian latar belakang, media memiliki peran besar dalam menciptakan stigma negatif atas perempuan di masyarakat melalui labelisasi dan konotasi yang cenderung tidak berpihak pada perempuan. Media di Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjadikan

perempuan sebagai objek pemberitaan yang menarik tanpa mempertimbangkan aspek empati.

Hal tersebut dikarenakan selera pasar memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter media. Berangkat dari logika itu, maka kekerasan verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh media massa tidak terlepas dari stigma yang memang telah berlaku di masyarakat. Media massa merupakan representasi masyarakat. Logika ini terbukti dari pemberitaan di *Harian Kompas*, 30 November 2009 yang berjudul *Kasus HIV/ AIDS Terus Naik, Kabupaten/ Kota Didorong Buat Peraturan Daerah Pencegahan HIV/ AIDS* (Listiorini, 2009: 16-17). Pada paragraf terakhir disebutkan bahwa, "...para wanita pekerja seks tersebut menjadi salah satu kelompok yang rentan tertular virus HIV." Kalimat ini memiliki kecenderungan menyudutkan perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks, melanggengkan stigma perempuan pekerja seks dekat dengan HIV.

Kepala Divisi Radio dan Televisi PKBI DIY, Fidarini Devi (komunikasi personal, 4 April 2014), menyatakan bahwa semua orang, perempuan atau laki-laki dengan profesi apapun, yang melakukan hubungan seks berisiko (tanpa menggunakan kondom), rentan tertular HIV. Begitupun mereka yang menggunakan jarum suntik secara bergantian. HIV juga menular melalui transfusi darah. Fakta-fakta tersebut lagi-lagi dikesampingkan oleh media.

Soekanto (Setyawati, 2009: 69-70) menyatakan bahwa cukup rumit membicarakan bahasa jurnalistik karena bahasa Indonesia sebagai pondasi bahasa jurnalistik ternyata memiliki indikasi bias gender. Kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia yang paternalistis menyebabkan bahasa Indonesia memiliki

indikasi untuk memperlihatkan ketimpangan gender. Beberapa ketimpangan gender dalam bahasa Indonesia tersebut, salah satunya tidak ada kategori perempuan untuk kata-kata yang menunjukkan pekerjaan, seperti polisi atau *camera-man*.³

Patriarki menjadi ideologi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi diskriminasi masyarakat atas perempuan. Selain ideologi patriarki, norma agama dan norma sosial juga memiliki andil besar dalam mengonstruksi makna perempuan di tengah masyarakat. Norma agama dan norma sosial yang berlaku begitu erat kaitannya dengan ideologi patriarki.

Menurut Michael Payne (1997: 394), ideologi patriarki secara sederhana didefinisikan sebagai budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan. Budaya patriarki seringkali disebut sebagai “aturan ayah”, membentuk seperangkat sistem makna yang terpusat pada laki-laki dengan maskulinitasnya.⁴ Femininitas dalam budaya patriarki diidentikkan sebagai *the second sex* atau jenis kelamin kedua yang memiliki ketertundukkan di bawah kontrol laki-laki. Implikasinya, budaya patriarki seringkali menyeret perempuan dan femininitas pada posisi yang lemah, tertindas dan tidak memiliki posisi tawar, misalnya dalam konteks ruang publik dan ruang domestik---masyarakat Indonesia cenderung mengidentikkan laki-laki dengan ruang publik, sedangkan perempuan dengan

³ Bahasa Indonesia mengidentikkan polisi dengan laki-laki, sedangkan untuk perempuan, kata “polisi” harus diikuti dengan “wanita” (polisi wanita atau polwan) untuk menunjukkan bahwa polisi yang bersangkutan berjenis kelamin perempuan (Setyawati, 2009: 69-70). Sama halnya dengan istilah *camera-man* yang cenderung merujuk hanya pada satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Istilah *camera person* yang lebih ramah gender belum populer di Indonesia.

⁴ Istilah “aturan ayah” pertama kali beredar di kalangan antropolog untuk mendeskripsikan masyarakat yang berada di bawah kekuasaan laki-laki yang lebih tua. Laki-laki yang lebih tua tersebut (“ayah”) memegang kekuasaan mutlak atas segala yang ada di masyarakat, termasuk kekuasaan atas mereka yang lebih muda bahkan yang tidak memiliki hubungan darah sekalipun (Listiorini, 2009: 6).

ruang domestik. Seorang istri yang bekerja masih dianggap sebagai hanya pencari nafkah tambahan dan seorang ibu yang dianggap terlampaui sibuk di ranah publik seringkali dicap sebagai “bukan ibu rumah tangga yang baik”.

Keberadaan beberapa regulasi nyatanya juga sarat akan diskriminasi berbasis gender. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, misalnya. Dina Listiorini (2009: 60-62) menyatakan bahwa keberadaan regulasi tersebut oleh banyak pihak dianggap mendiskriminasi perempuan karena salah satu pasalnya memperbolehkan aparat menangkap perempuan dengan tuduhan asusila hanya dengan melihat dandanan fisik.

Kemunculan berbagai perda tersebut menimbulkan banyak kontroversi sehingga pemerintah pada tahun 2004 kemudian memberlakukan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sekaligus menggantikan UU No. 22 Tahun 1999, namun hingga tahun 2008 masih bermunculan perda-perda dengan nama yang dikaitkan dengan norma-norma kesusilaan, misalnya Perda Anti Maksiat di Purwakarta dan Perda tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat di Sumatera Barat (Listiorini, 2009: 60).

Jawa Barat melalui Surat Edaran Bupati No. 451/ SE/ 04/ SOS/ 2001 juga melakukan hal serupa. Surat tentang upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan ini salah satu klausulnya berbunyi “...*dianjurkan kepada siswi SD, SLTR, SMU/ SMK, Lembaga Pendidikan Kursus dan Perguruan Tinggi Islam untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan menutup aurat*” (Listiorini, 2009: 62). Praktiknya diakui sebagai kewajiban memakai jilbab--- dalam hal ini, perempuan dikonstruksi untuk tidak memiliki otoritas atas tubuhnya; tidak diberikan hak untuk menentukan cara berpakaianya sendiri. Segenap ketidaksetaraan dan ketidakadilan berbasis gender tersebut yang kemudian dilanggengkan oleh media melalui pemberitaan.

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memproduksi makna melalui interaksi sosial yang dilakukan. Masyarakat juga mengonsumsi makna yang dikonstruksi oleh media melalui berita---mengidentikkan perempuan dengan femininitas dan laki-laki dengan maskulinitas; menganggap konsep lain, dalam hal ini konsep kesetaraan perihal gender, sebagai sesuatu yang di luar “normal”. Atas nama budaya dan/ atau agama, masyarakat menempatkan perempuan pada posisi kedua, melakukan pembenaran atas tindakan diskriminasi berbasis gender. Pemerintah, melalui berbagai regulasi, kemudian turut melanggengkan diskriminasi tersebut.

Media melanggengkan diskriminasi berbasis gender melalui proses produksi berita. Media melakukan pembingkaihan, menggiring opini publik atas nama mayoritas dan menciptakan diskriminasi baru terhadap kaum minoritas. Penelitian ini berfokus pada proses produksi berita dalam sebuah media massa. Proses produksi berita dipengaruhi oleh kebijakan redaksional media yang bersangkutan.

2. Penerapan Jurnalisme Sensitif Gender dalam Kebijakan Redaksional

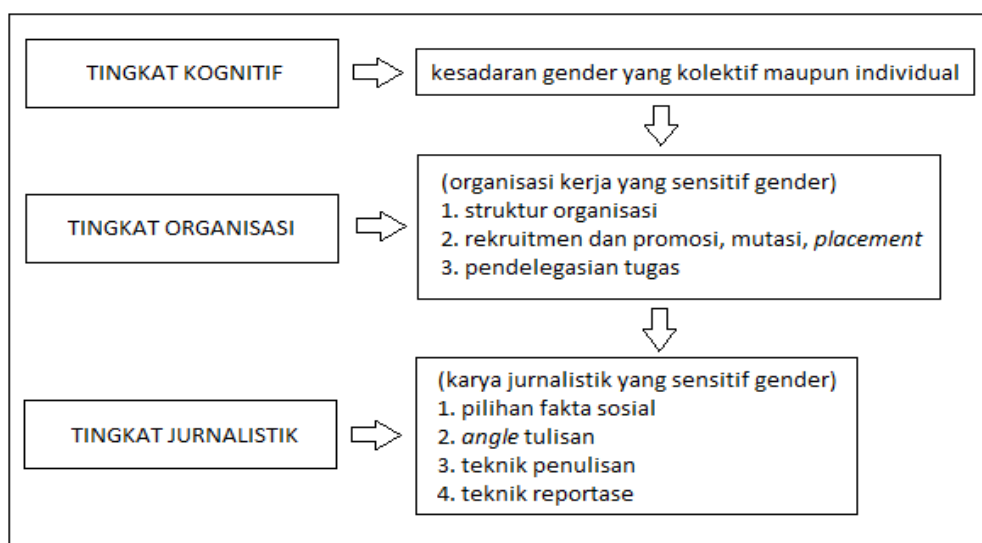
Debra J. Huls (Mukhotib, 1998: xii-xiii) menyatakan bahwa keadilan gender merupakan wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM)---tanpa penegakan keadilan gender, maka wujud HAM akan timpang. Huls menambahkan bahwa sudah selayaknya penegakan keadilan gender semakin merata di seluruh sektor, termasuk media tanpa terkecuali (Mukhotib, 1998: xii-xiii).

Pada dasarnya, media memang merupakan cermin dan refleksi dari kondisi sosial budaya masyarakat (Mukhotib, 1998: xxiv). Tidak mengherankan bila dalam konteks media massa secara umum tercermin bias-bias gender. Masih

banyak media yang meng-eksploitasi perempuan dan menjadikannya komoditi untuk meningkatkan tiras.

Agnes Astiarini (Mukhotib, 1998: xxv), di sisi lain mengungkapkan bahwa media massa merupakan wahana penting untuk ikut mengubah opini di masyarakat karena kemampuannya membentuk realitas dengan daya jangkau amat luas, maka pemahaman akan jurnalisme sensitif gender mutlak diperlukan untuk mengubah masyarakat masuk dalam sebuah tatanan baru, masyarakat yang mengusung kesetaraan dan keadilan berbasis gender.

BAGAN 2
Skema Penerapan Jurnalisme Sensitif Gender



Sumber: Abar (Mukhotib, 1998: 79)

Akhmad Zaini Abar (Mukhotib, 1998: 57-61) merumuskan beberapa tahapan yang perlu diterapkan untuk menciptakan sebuah jurnalisme sensitif gender.

Pertama (Abar dalam Mukhotib, 1998: 57-58), perlu dibangun kesadaran gender, baik yang bersifat kolektif maupun individual, di berbagai tingkatan

jajaran redaksional. Kesadaran gender secara kolektif maupun individual di kalangan wartawan akan melahirkan visi dan orientasi kebijakan redaksional yang menjunjung kesetaraan berbasis gender.

Kedua (Abar dalam Mukhotib, 1998: 58-59), di dalam praktik organisasi kerja redaksional, perlu tata struktural sedemikian rupa sehingga mencerminkan keadilan gender. Organisasi sebuah media, melalui kebijakannya, harus memberikan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki, baik yang terkait dengan struktur, rekrutmen, promosi, penempatan, mutasi, maupun pendelegasian tugas.

Ketiga (Abar dalam Mukhotib, 1998: 59-60), di tingkat kerja teknik jurnalistik. Penerapan jurnalisme sensitif gender di tingkat ini berkaitan erat dengan kebijakan redaksional sebuah media. Kebijakan redaksional (Nurhasanah, 2011) merupakan dasar pertimbangan yang menjadi acuan sikap media terhadap suatu peristiwa. Kebijakan redaksional mencerminkan ideologi media bersangkutan.

Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional terlihat dari ada atau tidaknya kebijakan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan profesional para wartawan dalam melihat dan menulis problematika gender. Kebijakan ini meliputi kebijakan pemilihan fakta sosial, *angle* penulisan, teknik penulisan dan teknik reportase.

Berbicara mengenai pemilihan fakta sosial, terdapat setidaknya enam fenomena sosiologis problematik sentral gender yang dapat diangkat oleh pers untuk melihat permasalahan perempuan, yaitu: (1) marginalisasi perempuan, (2) kekerasan terhadap perempuan, (3) sub-ordinasi perempuan, (4) beban kerja perempuan

yang berlebihan, (5) stereotip dan (6) pemberdayaan perempuan (Mukhotib, 1998: 60-61). Wartawan dapat meliput masalah-masalah kehidupan perempuan dalam perspektif gender melalui enam tema tersebut.

Kebijakan redaksional berbasis jurnalisme sensitif gender mengarahkan wartawan untuk mengembangkan dan mencari *angle* yang lebih memberdayakan perempuan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam rangka melahirkan karya-karya jurnalistik sensitif gender adalah ketika wartawan yang bersangkutan melakukan reportase atau peliputan, menentukan format dan gaya tulisan, serta penggunaan bahasa. Kebijakan redaksional berbasis jurnalisme sensitif gender mengarahkan kegiatan-kegiatan jurnalistik di atas untuk berorientasi pada kesetaraan maupun keadilan gender.

Penelitian ini berfokus pada penerapan jurnalisme sensitif gender di tingkat jurnalistik. Penelitian tidak berfokus pada penerapan jurnalisme sensitif gender di tingkat kognitif karena kesadaran gender, kolektif maupun individual, pelaku media lebih tepat diteliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian juga tidak berfokus pada penerapan jurnalisme sensitif gender di tingkat organisasi karena jurnalisme sensitif gender belum tentu terwujud bahkan dengan keadaan dimana proporsi wartawan lebih besar dibandingkan wartawati. Pemahaman akan kesetaraan gender tidak memandang jenis kelamin. Perempuan maupun laki-laki, wartawan maupun wartawati, sama-sama berpotensi memiliki pemahaman yang baik maupun sebaliknya dalam konteks kesetaraan gender (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik adanya konstruksi sosial realitas dan pemaknaan budaya, serta berfokus pada proses interaktif, memberi tekanan pada otentitas, nilai-nilai ditampilkan secara nyata, analisisnya tematik dan keterlibatan peneliti (Neuman, 2000: 16). Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti. Semua hal tersebut tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.

Berdasarkan *output* atau hasil penelitian, penelitian ini merupakan penelitian dasar atau *basic research*. Jenis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dasar tentang kehidupan sosial. Penelitian dasar berfokus untuk menolak atau mendukung teori-teori dan dapat bersifat eksploratif, deskriptif atau eksplanatif (Neuman, 2000: 23).

Riset ini merupakan penelitian dasar yang bersifat deskriptif dan bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dasar mengenai jurnalisme sensitif gender. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan jurnalisme sensitif gender oleh media massa, dalam hal ini media *online* berkonten khusus, yaitu Swara Nusa PKBI. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Swara Nusa, melalui kebijakan redaksionalnya, menerapkan jurnalisme sensitif gender.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola dan wartawan Swara Nusa PKBI kantor biro DIY, sebagai kantor biro pusat pengelolaan Swara Nusa, antara lain Mukhotib MD (pemimpin umum, editor), Maesur Zaky (pemimpin redaksi, editor), Arsita Mega (redaktur pelaksana), Annisa Armaelis (reporter) dan Emilda Rizky (kontributor).

Wawancara terhadap subjek penelitian di atas akan memberikan informasi kepada peneliti mengenai bagaimana kesadaran gender di tataran kolektif maupun individual para pelaku media Swara Nusa. Wawancara tersebut juga akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan redaksional Swara Nusa berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Menurut Yin (Ishak, 2011: 206-209), studi kasus dapat menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sesuai dengan kebutuhan data, peneliti memilih untuk mengungkap satu dari dua jenis penelitian tersebut, yaitu penelitian kualitatif.

Jika dilihat dari paradigma ilmu sosial, studi kasus digolongkan ke dalam paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme mengklaim bahwa kebenaran bersifat relatif dan kebenaran tersebut tergantung pada suatu perspektif. Metode ini menekankan pada kolaborasi antara peneliti dan partisipan. Metode ini memungkinkan partisipan, dalam hal ini pengelola dan wartawan Swara Nusa PKBI, menceritakan kisahnya dan berdasarkan kisah partisipan tersebut, peneliti dapat mendeskripsikan pandangan tentang realitas dan memperoleh pemahaman

yang lebih terhadap tindakan partisipan. Studi kasus biasa digunakan untuk menjawab rumusah masalah *how* dan *why*.

4. Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan kasus, yaitu pengelola dan wartawan Swara Nusa. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data primer, sedangkan studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Jenis dari data dokumen yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, antara lain berupa dokumen administratif Swara Nusa, seperti cetak biru nalar kerja dan *progress reports*, serta editorial Swara Nusa.

Pertanyaan, terkait wawancara mendalam untuk memperoleh data primer, mengacu pada skema penerapan jurnalisme sensitif gender yang terdapat pada sub bab Kerangka Teori. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kebijakan redaksional dalam hal pemilihan fakta sosial?
 - a. Fakta sosial apa saja yang dipilih untuk diulas?
 - b. Hal apa yang melatarbelakangi pemilihan isu tersebut?
 - c. Bagaimana proses pemilihan fakta sosial tersebut?
2. Bagaimana kebijakan redaksional mengenai pemilihan *angle*? Bagaimana perempuan dan laki-laki ditempatkan dalam, misalnya kasus perkosaan oleh remaja?
3. Bagaimana kebijakan redaksional terkait penulisan?

- a. Adakah keharusan untuk menggunakan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender, seperti “perempuan” untuk menggantikan “wanita”, “PPS” untuk menggantikan “PSK”?
 - b. Adakah pelatihan khusus untuk menyamakan pemahaman para pelaku media Swara Nusa terhadap isu gender, terutama mengenai alasan penggunaan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender dalam penulisan?
 - c. Bagaimana kontinuitas pelatihan tersebut? Apakah pelatihan diadakan secara berkala?
 - d. Adakah evaluasi berkala yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pelatihan tersebut mempengaruhi tingkat sensitivitas para pelaku media Swara Nusa?
4. Bagaimana kebijakan redaksional dalam konteks reportase?
- a. Bagaimana wartawan melakukan pendekatan terhadap narasumber, misalnya narasumber perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual?
 - b. Adakah kecenderungan memilih wartawati daripada wartawan untuk mewawancarai narasumber perempuan korban kekerasan seksual?
 - c. Teknik wawancara seperti apa yang diterapkan untuk isu sensitif, misalnya kasus perkosaan?
 - d. Bagaimana Swara Nusa menjamin kepentingan narasumber, misalnya terkait privasi?

- e. Apakah sebelum melakukan publikasi, wartawan Swara Nusa menunjukkan tulisannya kepada semua narasumber yang bersangkutan untuk melakukan *check and re-check* dan meminta persetujuan publikasi?

5. Proses Analisis Data

Penelitian ini menggunakan strategi analisis data, yaitu *relying on theoretical proportion*. Pada strategi ini (Ishak, 2011: 225), mula-mula peneliti mempelajari teori atau situasi ideal, kemudian dengan menggunakan teori tersebut, peneliti memotret dan menganalisis fenomena. Fungsi dari teori adalah membentuk proporsi-proporsi yang selanjutnya menjadi pisau analisis atas fenomena yang diteliti. Peneliti, dalam riset ini, awalnya mempelajari bagaimana penerapan jurnalisme sensitif gender yang ideal. Pemahaman tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional Swara Nusa.

Selain menggunakan strategi analisis, analisis studi kasus harus dikombinasikan dengan teknik analisis (Ishak, 2011: 226). Penelitian ini mengkombinasikan strategi analisis data *relying on theoretical proportion* dengan teknik analisis *pattern matching*. Teknik analisis *pattern matching* artinya melakukan penjodohan berpola atas data-data yang dikumpulkan sehingga data-data yang valid adalah data yang menunjukkan kesamaan pola (Ishak, 2011: 227). Teknik analisis ini biasa dipakai dalam penelitian kuantitatif. Penerapannya dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan mendeteksi kata kunci dari jawaban masing-masing narasumber. Penjodohan berpola kemudian dilakukan terhadap

kata kunci dari jawaban masing-masing narasumber tersebut. Jika dikaitkan dengan skema pengembangan jurnalisme sensitif gender yang telah diulas pada sub bab Kerangka Teori, penerapan teknik analisis *pattern matching* digambarkan sebagai berikut.

TABEL 1
Gambaran Penerapan Teknik Analisis *Pattern Matching*

PERTANYAAN PENELITI	SUBJEK PENELITIAN	POLA JAWABAN SUBJEK PENELITIAN	ANALISIS PENELITI
Pertanyaan 1, misalnya “Apakah sebelum melakukan publikasi, wartawan Swara Nusa menunjukkan tulisannya kepada semua narasumber yang bersangkutan untuk melakukan <i>check and re-check</i> dan meminta persetujuan publikasi?”	1	Ya	POLA A=4 (Ya) POLA B=2 (Tidak) (data yang valid adalah jawaban subjek penelitian dengan pola A--- lebih dari 50 persen)
	2	Ya	
	3	Tidak	
	4	Tidak	
	5	Ya	
	6	Ya	
Pertanyaan 2, misalnya “Adakah pelatihan khusus untuk menyamakan pemahaman para pelaku media Swara Nusa terhadap isu gender, terutama mengenai alasan penggunaan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender dalam penulisan?”	1	Ada	POLA C=4 (Ada) POLA D=1 (Tidak) (data yang valid adalah jawaban subjek penelitian dengan pola C--- lebih dari 50 persen)
	2	Tidak	
	3	Ada	
	4	Ada	
	5	Ada	
	-		
Pertanyaan 3, misalnya “Adakah kecenderungan memilih wartawati daripada wartawan untuk mewawancarai narasumber perempuan korban kekerasan seksual?”	1	Ada	POLA E=3 (Ada) POLA F=3 (Tidak) (dibutuhkan subjek penelitian 7, 8, 9 dan seterusnya untuk menemukan kesamaan pola yang jelas)
	2	Tidak	
	3	Tidak	
	4	Ada	
	5	Ada	
	6	Tidak	
	7	...	

Perihal pertanyaan pertama, kesamaan pola ditunjukkan oleh subjek penelitian 1, 2, 5 dan 6, maka jawaban dari subjek-subjek tersebutlah yang dapat dikatakan sebagai data yang valid.

Jika kesamaan pola terjadi seperti jawaban atas pertanyaan ketiga, maka peneliti harus mencari subjek penelitian tambahan untuk menemukan kesamaan pola yang lebih jelas.

Wawancara akan berhenti ketika peneliti telah menemukan kejenuhan data. Hal ini ditunjukkan oleh kesamaan pola pada jawaban atas pertanyaan kedua. Kesamaan pola jawaban subjek penelitian 3, 4 dan 5 dengan pola jawaban subjek penelitian 1 membuat peneliti tidak perlu mengajukan pertanyaan tersebut terhadap subjek penelitian 6 dan seterusnya.